

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah penulis tuangkan dalam pembahasan diatas, maka penulis menyimpulkan bahwa:

1. Implementasi assessment risiko dan assessment kebutuhan bagi narapidana dapat menjamin pemenuhan hak-hak narapidana dan memberikan pembinaan yang terarah dan tepat sasaran bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan. Namun, Implementasi assessment risiko dan assessment kebutuhan terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tanjung Pati belum cukup efektif. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tanjung Pati belum melaksanakan assessment RRI dan Kebutuhan Kriminogenik mulai dari awal masa pidana, sehingga pemberian program pembinaan belum mempertimbangkan hasil rekomendasi dari assessment. Pelaksanaan assessment di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tanjung Pati hanya dilakukan pada saat adanya usulan Reintegrasi bagi Narapidana seperti, Cuti Bersyarat (CB), Cuti Menjelang Bebas (CMB), dan Pembebasan Bersyarat (PB). Assessment tersebut dilakukan oleh Pembimbing kemasyarakatan dari Bapas Kelas II Bukittinggi.
2. Kendala yang dihadapi dalam implementasi assessment risiko dan assessment kebutuhan bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tanjung Pati adalah kurangnya assessor, adanya rangkap jabatan, dan kurangnya pelatihan bagi calon assessor yang menyebabkan minimnya pengetahuan tentang assesor dan wawasan mengenai assessment ini.

3. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut agar tidak berpengaruh pada kemaksimalan dalam memberikan pembinaan kepada narapidana yaitu: dengan melakukan penilaian secara berlanjut dan maksimal oleh Wali Pemasyarakatan yang telah ditunjuk oleh kepala Lapas. Penilaian dilakukan mulai pada saat awal masa pidana hingga selesainya masa pidana narapidana di Lembaga Pemasyarakatan.

B. Saran

Penulis memberikan saran beberapa hal untuk implementasi assessment risiko dan assessment kebutuhan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tanjung Pati ini agar pelaksanaannya menjadi lebih baik, berupa:

1. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tanjung Pati Perlu menambah jumlah assessor, agar pelaksanaan assessment risiko dan assessment kebutuhan Warga Binaan Pemasyarakatan dapat berjalan secara optimal.
2. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan diharapkan dapat mengadakan pelatihan secara berlanjut bagi calon Assesor Pemasyarakatan, agar assessor di Lembaga Pemasyarakatan dapat melaksanakan assessment secara mandiri.
3. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tanjung Pati diharapkan dapat melakukan pelaksanaan assessment risiko dan assessment kebutuhan mulai dari awal masa pidana, agar pemberian pembinaan terhadap narapidana dapat dilakukan secara tepat dan sesuai dengan risiko dan kebutuhan dari setiap narapidana.
4. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tanjung Pati diharapkan dapat menambah jumlah pegawai yang ada di Lapas demi terjaganya kemaksimalan dalam pekerjaan.